

Advokasi Kepatuhan Perizinan UMKM oleh Program Studi Hukum UMSIDA

Oleh:
Adelia Alvisa W,
Dosen Pembimbing : Noor Fatimah Mediawati
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Februari-2026

Pendahuluan



UMKM merupakan pilar strategis perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 61,97% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga berperan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, pelaku UMKM memerlukan legalitas berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi dalam sistem perizinan berbasis risiko yang memberikan kepastian hukum serta akses pembiayaan dan fasilitas pemerintah. Namun, sekitar 77% UMKM masih belum memiliki legalitas formal, sehingga berpotensi menghambat pengembangan usaha.

Di Kabupaten Sidoarjo terdapat 171.264 UMKM, tetapi hanya 10.891 yang telah memiliki legalitas atau NIB. Rendahnya kesadaran hukum dan keterbatasan literasi digital menjadi hambatan utama dalam proses perizinan. Melalui kegiatan advokasi dan pendampingan, Program Studi Hukum UMSIDA berperan membantu penerbitan NIB bagi pelaku UMKM. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pendampingan tersebut dalam meningkatkan kepatuhan hukum dan keberlanjutan usaha UMKM.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana bentuk kegiatan advokasi yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum UMSIDA untuk meningkatkan kepatuhan perizinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo?
- Apa kebaruan utama OSS-RBA dalam proses perizinan berusaha dibandingkan OSS non-RBA?

Metode

Jenis penelitian: Hukum empiris

Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach)

Teknik pengumpulan data: wawancara, studi lapangan, dokumentasi

1

2

3

4

5

6

Jenis penelitian: Hukum empiris

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach)

Analisis data: deskriptif kualitatif

Hasil dan Pembahasan 1

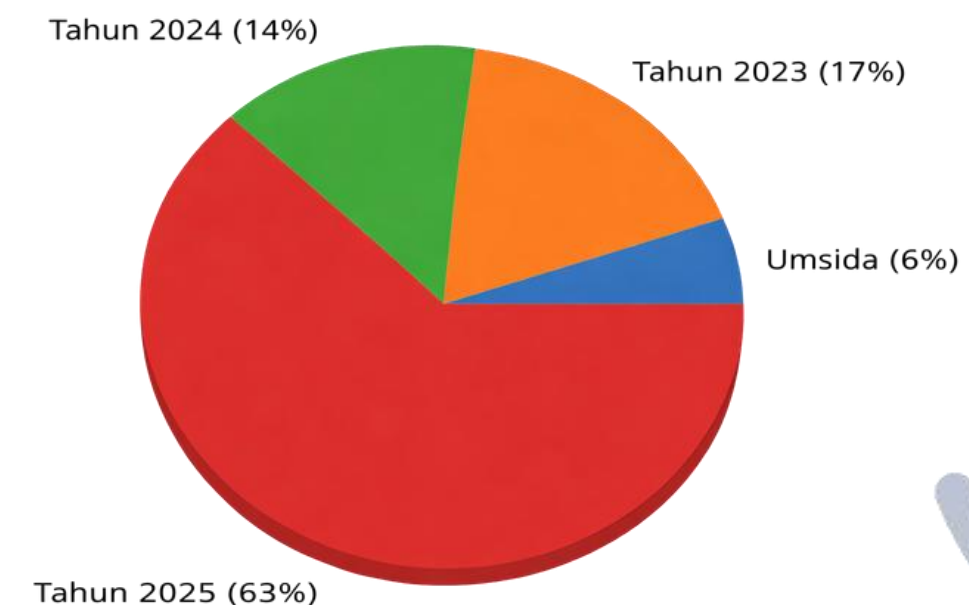
Advokasi Prodi Hukum UMSIDA terhadap Kepatuhan Hukum UMKM di Sidoarjo

- Program Studi Hukum UMSIDA melaksanakan advokasi non-litigasi melalui sosialisasi hukum, konsultasi dan edukasi perizinan, pendampingan teknis OSS-RBA, serta fasilitasi penerbitan NIB yang terintegrasi dalam mata kuliah Hukum Bisnis, Hukum Administrasi Negara, dan program Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kepatuhan administratif UMKM terhadap perizinan berbasis risiko. Hasilnya, dari 1.635 NIB yang terbit pada periode 2023–2025, sebanyak 132 NIB (6%) merupakan kontribusi langsung pendampingan Prodi Hukum UMSIDA, yang menunjukkan efektivitas model advokasi akademik dalam mendorong legalisasi usaha.

Keterangan:

- Sebesar 6% penerbitan NIB pada periode 2023–2025 merupakan hasil pendampingan Prodi Hukum UMSIDA, sedangkan 94% berasal dari jalur lainnya. Persentase ini menegaskan bahwa intervensi advokasi akademik memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan perizinan UMKM serta memperkuat formalitas usaha di Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 4. Diagram Persentase



Hasil dan Pembahasan 2

Aspek	SPPL	UKL-UPL	AMDAL
Skala usaha	Rendah / kecil	Menengah	Besar
Tingkat risiko (OSS-RBA)	Risiko rendah	Risiko menengah	Risiko tinggi
Dampak lingkungan	Minimal	Cukup signifikan	Signifikan, luas, dan kompleks
Bentuk dokumen	Pernyataan kesanggupan	Dokumen pengelolaan dan pemantauan	Kajian dampak lingkungan
Proses perizinan	Sederhana dan cepat	Administratif dan teknis	Panjang dan komprehensif
Kewajiban kajian lingkungan	Tidak ada	Ada	Ada (mendalam)
Contoh kegiatan	Usaha mikro, warung, bengkel kecil	Hotel kecil, gudang	Pertambangan, industri besar

Tabel Perbedaan SPPL, UKL-PL, AMDAL

Kebaruan utama OSS-RBA terletak pada penerapan klasifikasi risiko yang menentukan kewajiban dokumen lingkungan secara proporsional melalui mekanisme penapisan otomatis dan integrasi digital. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang tidak membedakan secara tegas tingkat risiko, OSS-RBA menetapkan kewajiban bertingkat—SPPL untuk risiko rendah, UKL-UPL untuk risiko menengah, dan AMDAL untuk risiko tinggi—sehingga perizinan menjadi lebih adil, efisien, dan terukur. Implikasinya, UMKM berisiko rendah memperoleh kemudahan melalui prosedur sederhana dan cepat tanpa mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha

Temuan Penting Penelitian



Temuan 1. Penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi non-litigasi Program Studi Hukum UMSIDA melalui sosialisasi, edukasi perizinan, pendampingan OSS-RBA, dan fasilitasi penerbitan NIB yang terintegrasi dengan pembelajaran dan ABDIMAS efektif meningkatkan kepatuhan perizinan UMKM. Model advokasi akademik tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga meningkatkan literasi hukum dan kesadaran legalitas usaha. Kontribusi 6% terhadap total penerbitan NIB periode 2023–2025 menegaskan dampak nyata pendampingan dalam mendorong formalisasi usaha di Kabupaten Sidoarjo.



Temuan 2. Kebaruan OSS-RBA terletak pada penerapan pendekatan berbasis risiko yang menggantikan sistem seragam pada OSS non-RBA, termasuk integrasi izin lingkungan dan penyederhanaan kewajiban melalui klasifikasi risiko. Perubahan ini memperkuat efisiensi proses, kepastian waktu layanan, dan kepastian hukum, sehingga UMKM memperoleh akses legalitas yang lebih proporsional, sederhana, dan terukur sesuai tingkat risiko usahanya.

Manfaat Penelitian

- Meningkatkan kepatuhan hukum UMKM

- Memberikan kepastian hukum dan perlindungan usaha

- Mempermudah akses pembiayaan dan program pemerintah

- Mendorong keberlanjutan dan pengembangan usaha UMKM

- Mendukung pembangunan ekonomi lokal di Kabupaten Sidoarjo

Referensi

- [1] A. H. Aliyah, "Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," J. Ilmu Ekon., vol. 3, no. 1, pp. 64–72, 2022.
- [2] F. M. Irfan, Suharto, and Hanif, "Pengaruh Modal Usaha dan Product Innovation Terhadap Eksistensi UMKM dengan Digital Marketing Sebagai Variabel Moderating dalam Perspektif Ekonomi Islam," J. Ilm. Ekon. Islam, vol. 9, no. 01, pp. 1259–1278, 2023.
- [3] S. Fatimah, R. E. Mardani, A. R. Widowati, A. I. Kamil, and A. W. Nurgoho, "Pendampingan Pembuatan Permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Sistem OSS-RBA oleh UMKM," Nusan. Mengabdikan Kpd. Negeri, vol. 2, no. 1, pp. 119–129, 2025.
- [4] R. C. Valery, D. Permana, and D. Sufianto, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Pelayanan Online Single Submission (Oss) Ta. 2023 - Ta. 2024 Di Kota Bandung," J. Prinsip, vol. 2, no. 1, pp. 613–624, 2025.
- [5] A. S. R. Wulandari, Patawari, A. Esa, and L. Mery, "Dinamika Sistem Online Single Submission (OSS) Sebagai Solusi Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Terhadap Terpenuhinya Pelayanan Publik," Petitum, vol. 10, no. 2, pp. 107–119, 2022.
- [6] R. Faustina and B. Rusli, "Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online Di Dpmpstp Kota Cirebon," Responsive J. Pemikir. Dan Penelit. Bid. Adm. Sos. Hum. Dan Kebijak. Publik, vol. 8, no. 1, pp. 29–41, 2025, doi: 10.24198/responsive.v8i1.61157.
- [7] T. Marlina et al., "Penguatan Legalitas Pelaku UMKM melalui Pembuatan Nomor Induk Berusaha di Kelurahan Watubelah," J. Pengabdian. Masy. Inov. Indones., vol. 2, no. 2, pp. 251–256, 2024.
- [8] Soebiantoro and N. Haryanti, "Peningkatan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," TRANSGENERA J. Ilmu Sos. Polit. dan Hum., vol. 1, no. 2, pp. 122–136, 2024.
- [9] M. R. D. Ramadhan and M. Yasin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha UMKM Coffee Shop Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo," J. Publ. Sist. Inf. dan Manaj. Bisnis, vol. 2, no. 3, pp. 119–130, 2023.
- [10] I. N. Sah, I. N. Roshida, and N. Ilhama, "Pendampingan Pendaftaran Legalitas NIB Pada UMKM ' Ngemil Yuk ' Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)," J. Pengabdian. Inov. Masy., vol. 2, no. 2, pp. 46–48, 2025.
- [11] N. Suryanti, D. Yuanitasari, S. D. Judiasih, and M. Assalihee, "Empowering Women Entrepreneurs in MSMEs : The Role of Legal Advocacy in Overcoming Gender Barriers," Indones. J. Advocacy Leg. Serv., vol. 7, no. 1, pp. 1–34, 2025.
- [12] D. M. Hutajulu, F. S. Islami, and B. E. Saputra, "Pendampingan Pembuatan IUMK dan NIB bagi Pengusaha UMKM Desa Ngargogondo," J. Pengabdian. dan Pemberdayaan. Masy., vol. 8, no. 1, pp. 65–73, 2024, doi: 10.30595/jppm.v8i1.19264.
- [13] Yuliana, "Reformasi Sistem OSS dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia," Media Huk. Indones., vol. 3, no. 4, pp. 209–216, 2025.
- [14] W. Ariesta, "Advokasi Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Bantuan Hukum," YURIJAYA, J. Ilm. Huk., vol. 6, no. 3, pp. 367–378, 2024.
- [15] Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, no. 176733. 2023.
- [16] Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, "UU Cipta Kerja Dorong Pengembangan dan Digitalisasi UMKM di Indonesia," 2020.
- [17] R. Dirkareshza, R. D. Agustanti, and S. A. Hulu, "Pemberdayaan Hukum Dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Law Student Village Project (LSVP)," SELAPARANG. J. Pengabdian. Masy. Berkemajuan, vol. 7, no. 4, pp. 2864–2872, 2023.
- [18] N. F. Mediawati, V. Firdaus, A. P. Astutik, A. J. P., and A. Alvisa, "Pendampingan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah melalui Gerakan Problem Solver and Purpose (PSP) di Kabupaten Sidoarjo," Borobudur J. Leg. Serv., vol. 5, no. 2, pp. 51–65, 2024.
- [19] "Data Wawancara Dengan Dinas Koperasi." 2026.
- [20] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, no. 15. 2021.
- [21] Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, no. 253386. 2025.
- [22] Admin Dana Mitra Lingkungan, "Integrasi sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS RBA) dengan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet," Dana Mitra Lingkungan.

TERIMA KASIH



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)